

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Keaslian Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum tentang Interpretasi	27
B. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Hukum Pidana	37
1. Pidana	38
2. Hukum Pidana	40

C. Tinjauan Singkat Terkait Hukum Pidana Lokal	54
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Tipe Penelitian Hukum	57
B. Bahan Penelitian	59
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	62
D. Cara Menganalisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Interpretasi pembentuk Peraturan Daerah terhadap frasa “sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya” dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam penetapan sanksi pidana Peraturan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta	67
1. Badan atau lembaga yang membentuk Peraturan Daerah...	67
2. Peraturan Daerah yang memuat ketentuan dan sanksi pidana	76
3. Interpretasi Pembentuk Peraturan Daerah mengenai ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah	96
B. Pengaturan Terkait Formulasi Penetapan Sanksi Pidana Peraturan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Masa Mendatang.	161
1. Penetapan sanksi pidana berdasarkan regulasi	162
2. Penetapan sanksi pidana berdasarkan doktrin	171
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	179
A. Kesimpulan	179

1. Interpretasi pembentuk Peraturan Daerah terhadap frasa “sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya” dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam penetapan sanksi pidana	179
2. Pengaturan terkait formulasi penetapan sanksi pidana Peraturan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa mendatang	180
B. Saran	183
DAFTAR PUSTAKA	185
DAFTAR INDEKS ISTILAH	191
DAFTAR INDEKS SUBYEK	195
GLOSARIUM	198